

BAB VII

Antara Semangat BerIslam dan Sekularisme Politik: Masyarakat Sipil Islam dalam Demokrasi di Indonesia

Endang Turmudi

Hingga tahun 1984, ketika pemerintah Indonesia meluncurkan “*asas tunggal*”, partai politik di Indonesia cenderung sangat ideologis. Seperti dijelaskan oleh Faith dan Castle (1970), sebagian besar partai politik tersebut mengambil sumber rujukannya pada ideologi atau pandangan dunia (*world view*), di antaranya berasal atau dipengaruhi oleh norma agama. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa partai Islam yang ada, misalnya Nadhatul Ulama (NU), merujuk juga pada sumber nilai lain selain Islam. Menurut Faith dan Castle, NU sebagai partai Islam telah pula mengambil nilai lain, yakni Javanisme sebagai sumber rujukan politiknya. Sementara Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) mengambil nilai-nilai modern Barat, di samping Islam yang menjadi penggerak politiknya.

Endang Turmudi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: endangturmudi@yahoo.com

© 2024 Editor & Penulis

Turmudi, E. (2024). Antara Semangat BerIslam dan Sekularisme Politik: Masyarakat Sipil Islam dalam Demokrasi di Indonesia. Dalam E. Turmudi (Ed.), *Masyarakat Sipil Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia* (241–248). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.753.c986
E-ISBN: 978-623-8372-64-5

Hidupnya semangat Islam dalam politik Indonesia menandai hadirnya aliran dalam politik Indonesia. Kalangan Islam, meskipun juga berbeda secara ideologis di antara partai Islam yang ada, cukup kuat memegang apa yang biasa disebut sebagai politik Islam. Alasan mereka seperti itu adalah karena masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang sejak lama dalam situasi politik religius yang dihadapkan pada ketidakadilan Belanda di masa penjajahannya di Indonesia. Artinya, politik yang mengatasnamakan umat Islam sudah hidup saat itu. Meskipun demikian, modernisasi yang mengelilingi masyarakat Indonesia telah pula melahirkan politisi-politisi modern yang membebaskan diri dari keterikatan terhadap nilai agama di samping yang masih berpegang kuat pada nilai agama. Seiring dengan lahirnya kalangan terpelajar yang terpengaruh oleh pikiran dan pandangan dunia modern, semangat politik kalangan berorientasi Islam (*islamic oriented*), pada sisi lain, juga semakin menguat pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka. Polarisasi Islam dan sekuler dalam berpolitik kemudian menandai diskusi-diskusi menjelang kemerdekaan tersebut dan bahkan menentukan apakah Indonesia harus menjadikan Islam sebagai dasar rujukan undang-undang yang dibuatnya atau tidak.

Polarisasi seperti ini, yakni hadirnya politik Islam dan sekuler, terus berlangsung sejak pemilu pertama di tahun 1955, 1971, dan bahkan 1977 serta 1982. Partai politik Islam terus saja mendapatkan suara. Pada pemilu 1977, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai satu-satunya partai Islam mendapatkan suara sekitar 29%. Meskipun terjadi penurunan dukungan, transmisi dukungan atau bahkan ideologis terus terjadi di mana angkatan muda pendukung partai Islam mengikuti orientasi politik orang tua mereka. Di kalangan NU misalnya, mereka terus menjadi penerus dalam memperjuangkan politik Islam mereka (Fealy, 2003). Apa yang menjadi pengikat mereka menjadi pejuang politik Islam atau memberikan dukungannya lewat partai Islam adalah semangat ideologis dengan merasa wajib mendukung partai Islam. Sentimen sebagai muslim secara alami terus dibina melalui ritual atau lingkungan berorganisasi mereka. Polarisasi sebagai penganut politik Islam ini terus terbina secara alami dalam

kehidupan politik mereka, di mana pembingkaihan (*framing*), identifikasi diri, serta emosi mewarnai aktivitas politik mereka. Ini adalah proses yang oleh Durkheim (lihat Pizarro et al., 2022) disebut sebagai *effervescence*, yakni sentimen kekelompokan sebagai muslim yang dalam kasus pengikut NU adalah dengan berpegang pada ideologi ahli *sunnah wal jama'ah*, yang secara terus menerus mereka bina baik melalui ritual agama maupun acara-acara kelompok. Artinya, politik Islam yang dianut oleh umat muslim yang tergabung dalam ormas-ormas Islam terbentuk melalui proses panjang. Demikianlah mereka mengartikan dan memandang politik seperti itu. Seperti dikatakan oleh para ahli psikologi, dunia atau dunia politik adalah dunia yang dipersepsikan (*perceived world*) yang terbentuk dalam perhadapan atau pertemuan mereka dengan berbagai peristiwa dan hadirnya kelompok dan nilai-nilai lain. Jadi, meskipun kecenderungan politik Islam ini hilang atau dihapus oleh Orde Baru melalui politik “*asas tunggal*”, tetapi selalu ada masa yang memungkinkan hal tersebut hidup dan menguat kembali. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, spirit untuk mengembangkan politik Islam seolah mendapat tempat sehingga berbagai pemerintah daerah membuat puluhan Perda Syariat (Bourchier, 2019). Ini adalah suatu indikasi menguatnya spirit politik Islam, padahal orientasi politik agama seperti itu sudah dipinggirkan dengan hadirnya “*asas tunggal*”.

Dalam konteks demokratisasi, organisasi masyarakat sipil Islam ini menempati posisi penting dalam politik Indonesia karena mereka mempunyai anggota banyak yang menjadi rakyat Indonesia. Selain itu, secara teoretis organisasi ini penting karena seperti dinyatakan oleh Putman (1994) masyarakat sipil adalah penggerak demokrasi. Artinya, demokrasi dapat bermasalah apabila organisasi-organisasi tersebut tidak sehat atau tidak bergerak. Dengan bergeraknya demokrasi—seperti kita saksikan—hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia bukan hanya hidup, tetapi juga cukup sehat berenergi karena mereka—yakni Masyarakat Islam—seperti dinyatakan oleh Hefner (2000) memiliki etika yang mendorong mereka untuk menjalankan demokrasi. Selain ajaran yang bersifat umum sebagai modal

sosial, seperti amanah (*trust*) dan keadilan (*justice*), etika Islam ini menekankan juga tentang pentingnya demokrasi. Dalam Islam jelas terdapat konsep kebebasan dan melakukan musyawarah sebagai medium atau forum demokratis yang dalam konsepsi politik mutakhir disebut sebagai demokrasi deliberatif.

Demokrasi mungkin secara formal dijalankan melalui pemilu, misalnya, tetapi intisari material demokrasi yang ada pada masa akhir-akhir ini ternodai oleh praktik-praktik ketidakjujuran, seperti dilakukannya kecurangan oleh kelompok tertentu atau dilakukannya politik uang (Aspinal & Berenschot, 2019) untuk membeli dukungan peserta pemilu. Di samping kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana saat ini masih disebut sebagai dalam transisi demokrasi, apa yang sering dituding sebagai faktor penyebab atau penghalangnya adalah masih kuatnya politik identitas. Semangat primordialisme dianggap menghambat politik Indonesia untuk menuju demokrasi yang beneran atau substansial dan sehat. Sebagian tokoh atau politisi muslim dinilai masih menggunakan semangat berislam dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka. Beberapa kasus memperlihatkan kecenderungan ini. Setidaknya itulah yang dituding oleh para pengamat yang menginginkan politik yang ada berkembang secara rasional dan tidak dijalankan dengan kepentingan-kepentingan identitas, seperti kepentingan kelompok agama tertentu.

Kontestasi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 dianggap sarat dengan politik identitas. Setidaknya semangat Islam mewarnai gerakan protes, yang disebut “Aksi 212”, terhadap pemerintah Gubernur Jakarta saat itu, yang dianggapnya sebagai anti-Islam. Semangat tersebut dianggap dieksploitasi untuk kepentingan calon gubernur dari kalangan Islam. Inilah yang menyebabkan banyak tokoh dan pimpinan negara—termasuk para intelektual—khawatir dengan apa yang mereka sebut sebagai politik identitas. Politik ini di dalamnya mengandung elemen primordialisme Islam yang menyeruak menantang atau melawan pemerintah sekuler. Kekhawatiran ini berdasar pada anggapan bahwa politik identitas yang membawa

identitas muslim yang melatarbelakangi mereka dalam menjalankan politik tersebut dianggap tidak rasional. Politik dengan sentimen agama bukanlah dimensi yang harus dikembangkan dalam proses demokratisasi di Indonesia sebab politik semacam ini akan merugikan banyak pihak karena hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Politik yang harus diperjuangkan adalah yang menghargai kesetaraan, menjunjung kualitas dalam pemilihan pemimpin, dan tetap menjaga persatuan yang sudah diikat oleh ideologi bersama, yakni Pancasila, serta komitmen bersama untuk hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti disinggung sebelumnya, meninggalkan politik Islam sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sipil Islam. Meskipun mereka terpaksa, tetapi pada akhirnya mereka pasrah dengan mengubah secara formal dasar ideologis mereka dengan Pancasila (Ismail, 1995). Namun, seperti terlihat pada beberapa kasus politik seperti aksi bela Islam tersebut, semangat berpolitik Islam masih tetap hidup untuk tidak mengatakan kuat pada akar rumput muslim di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada tatanan kepemimpinan, para tokoh Islam sepertinya sudah rela meninggalkan atau membuang politik identitas ini. Tetapi tidak demikian pada level akar rumput mengingat orientasi ideologis itu tidak mudah dihapus oleh peraturan. Hal ini bisa hilang oleh kesadaran atau pilihan masyarakat Islam sendiri. Oleh karena itulah Yahya Staquf sebagai pemimpin NU berusaha mengajak agar masyarakat Islam meninggalkan atau tidak memakai politik identitas dalam berpartisipasi politik di Indonesia. Ia secara tegas menyebut dampak negatif dari politik identitas dan meminta umat Islam untuk menyingkirkannya.

Dalam kasus NU, perubahan politik dari yang semula berorientasi Islam ke yang “sekuler” sangat terlihat jelas. Yahya Staquf terus berusaha agar politik identitas tidak menjadi orientasi politik Masyarakat NU. Meskipun hanya memperkuat saja, langkah politik Yahya dalam mempreteli primordialisme identitas Islam dalam politik masyarakat yang dipimpinya cukup berarti. Akan tetapi, langkah ini di sisi lain menandakan masih adanya kecenderungan pada masyarakat NU

untuk berpolitik religius. Meskipun tidak sepenuhnya benar, penilaian Yahya cukup faktual karena secara teoritis keterikatan seseorang pada sentimen agama memang sulit untuk berubah, bahkan bisa dikatakan sulit hilang. Artinya, cukup fenomenal bahwa keinginan untuk berjuang secara politik untuk umat Islam tetap hidup, terutama di masa sekarang ketika manusia sedang dilanda orientasi post-sekularisme. Para cendekiawan dunia seperti Habermas (2008) yang mengemukakan istilah tersebut dan Berger (1999) melihat terjadinya orientasi religius pada manusia sekuler, yaitu suatu keadaan yang menurut mereka tidak pernah terbayangkan.

Beberapa partai Islam dalam pemilu masih mempunyai suara, meskipun sangat tidak signifikan. Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengklaim sebagai pewaris Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sama sekali tidak mendapatkan suara yang berarti dalam beberapa pemilu yang diadakan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga hanya mampu bertahan hidup dan bahkan konon tidak ada calon legislatifnya yang lolos ke “Senayan” pada pemilu 2024 yang lalu. Di tiga daerah yang diteliti partai-partai yang berlatar belakang Islam kuat, seperti PKB, PPP, atau PKS juga secara umum kalah oleh partai-partai sekuler. Jadi, meskipun mereka para partai Islam masih hidup dan pada sisi lain orientasi berislam masyarakat cukup kuat, dukungan terhadap politik Islam—setidaknya yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam—tidaklah kuat. Dalam tiga daerah yang diteliti, terlihat adanya penurunan atau melemahnya dukungan umat Islam terhadap partai-partai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun semangat beragama atau semangat berislam pada masyarakat sipil Islam meningkat, tetapi dalam hal berpolitik mereka tidak lagi memilih partai Islam sebagai kendaraan politik mereka (Turmudi, 2016). Artikulasi kepentingan politik mereka telah mereka arahkan pada partai-partai sekuler, bahkan pada partai-partai baru yang dibentuk setelah reformasi politik dilakukan setelah jatuhnya Orde Baru. Di masa demokratisasi ini tidak ada lagi slogan bahwa mendukung partai Islam adalah wajib seperti pernah dikatakan oleh seorang

ulama di tahun 1970-an. Oleh karena itu, secara sinis seorang kawan mengatakan bahwa lunturnya semangat berpolitik Islam ini adalah indikasi keberhasilan Presiden Suharto yang sejak memerintah sudah melancarkan politik yang dinilai pengamat sebagai islamofobia. Hal penting yang perlu dinyatakan adalah bahwa di antara tokoh-tokoh Islam sendiri, terdapat mereka yang terus menerus menganjurkan untuk meninggalkan politik agama.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting adalah perlu dinyatakan bahwa lepas dari menurunnya dukungan terhadap politik Islam, partisipasi politik masyarakat sipil tetap tinggi, seperti dapat dilihat dari pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sipil tetap berenergi untuk ambil bagian dalam berkembangnya demokrasi di Indonesia. Kuatnya masyarakat sipil yang beragama Islam dalam melakukan politik berdemokrasi sangat penting bagi perkembangan politik Indonesia ke depan karena mereka mampu menjadi penggerak demokrasi sendiri, apalagi dengan jumlah mereka yang signifikan. Selain itu, mereka mendasarkan tindakan dan sikap politik mereka pada etika yang, dalam banyak hal, menghargai nilai-nilai demokrasi. Modal sosial, seperti kepercayaan, adil, dan selalu bermusyawarah adalah materi normatif penting yang menggerakkan demokrasi politik di mana mereka hidup. Serta yang tak kalah penting adalah perubahan perilaku politik mereka dari yang sebelumnya berorientasi Islam menjadi moderat (lebih terbuka) yang merupakan modal potensial yang perlu terus digerakkan oleh para pemimpin untuk mencapai demokrasi substansial yang diharapkan. Tentu saja semua ini juga akan tergantung dan ditentukan oleh kiprah politik para pelaksana demokrasi itu sendiri, terutama penguasa. Kebebasan yang disediakan demokrasi bisa juga diselewengkan oleh para pemegang kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Alih-alih menumbuhkan dan menerapkan nilai substansif dalam demokrasi mereka bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas demokrasi yang sudah dicapai. Meskipun demikian, kuatnya masyarakat sipil Islam akan ikut membantu mencegah setiap penyelewengan, sehingga

demokrasi tetap berjalan pada koridornya. Hal ini juga merupakan akibat dari proses demokratisasi yang digerakkan oleh masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya.

Daftar Referensi

- Aspinal, E. & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Berger, P. L. et al. (1999). *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics*. The ethics and public policy center.
- Bourchier, D. M. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad politik ulama: Sejarah NU 1952–1967*. LKIS.
- Feith, H., & Castle, L. (Ed.). (1970). *Indonesian political thinking, 1945–1965*. Cornell University Press.
- Habermas, J. (2008, June 18). Notes on a post-secular society: Both religious and secular mentalities must be open to a complementary learning process if we are to balance shared citizenship and cultural difference. *Signandsight.com*. <http://www.signandsight.com/features/1714.html>.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Ismail, F. (1995). *Islam, politics and ideology in Indonesia: A study of the process of Muslim acceptance of Pancasila*. [Disertasi, McGill University]. McGill University Library. <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/2801ph921>
- Pizarro, J. J., Zumeta, L. N., Bouchat, P., Włodarczyk, A., Rimé, B., Basabe, N., Amutio, A., & Páez, D. (2022). Emotional processes, collective behavior, and social movements: A meta-analytic review of collective effervescence outcomes during collective gatherings and demonstrations. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.974683>
- Putman, R. D. (1994). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Prince University Press.
- Turmudi, E. (2016). Islamic politics in contemporary Indonesia. *International Journal of Political Studies*, 2(3), 1–9.